

**Judul** : Pembahasan RUU Pangan, ide penggabungan Bapanas & Bulog mulai dibahas  
**Tanggal** : Senin, 15 Desember 2025  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 2

Pembahasan RUU Pangan

## Ide Penggabungan Bapanas & Bulog Mulai Dibahas

PANITIA Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pangan, Komisi IV DPR RI sudah melakukan kunjungan ke berbagai kampus, kepala daerah dan berbagai pihak untuk mengumpulkan bahan dalam menetapkan UU Pangan. Namun, dari sekian banyak isu yang masuk dalam RUU Pangan, wacana penggabungan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dengan Perum Bulog menjadi sorotan. Nampaknya, rencana penyatuan Bapanas dengan Perum BULOG semakin dekat setelah draf Revisi UU Pangan versi 24 September 2025

telah menetapkan kedua lembaga ini akan dilebur menjadi satu institusi bernama BULOG. Informasi itu diungkapkan Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan 2010-2020, Khudori. Melalui revisi ini, BULOG ditetapkan sebagai lembaga yang bertugas, berfungsi, dan berwenang menyelenggarakan urusan Pangan serta bertanggung jawab kepada Presiden. BULOG akan ber Kantor pusat dan berkedudukan di ibu kota negara. BULOG melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pangan me-

lalui koordinasi, perumusan, dan penetapan, serta pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pangan. Fungsi-fungsi ini pada saat sekarang sebenarnya melekat di Bapanas. Khudori mengatakan, nantinya BULOG bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan sepanjang rantai pasok penyelenggaraan pangan, mencakup perencanaan, penyusunan neraca pangan, ketersediaan cadangan, stabilitas pasokan dan harga, pengelolaan dan jumlah cadangan, stabilisasi harga dan distribusi, kebutuhan ekspor dan impor. "Hingga harga pembelian Peme-

rintah, keterjangkauan, penganekaragaman, kerawanan, penyelamatan, keamanan, pengawasan, pemberian izin dan pengendalian impor, dan sistem informasi pangan," bebernya. Lebih jauh, ia mengingatkan jika penggabungan Bapanas dan Bulog ada resiko yang harus diperhitungkan. "Yakni perlu adaptasi, dan anggaran yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah. "Semakin lama adaptasinya, semakin besar ongkosnya," kata dia. Sementara, anggota Komisi IV DPR Firmansyah Soebagyo sangat setuju

jika Pemerintah dan DPR sepakat untuk menggabungkan Bapanas dengan Bulog, dan membentuk Kementerian Pangan. Menurut dia, penggabungan Bapanas dan BULOG akan membuat Indonesia semakin kuat dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya. "Lebih efektif, efisien dan ekonomis," ujar Firmansyah. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pandangan Firmansyah Soebagyo dan Khudori terkait usulan Bapanas dan Bulog digabung hingga membentuk Kementerian Pangan, berikut wawancaranya.

### KHUDORI

Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan 2010-2020

## Lebih Baik Bapanas Jadi Kementerian Saja



“Hemat saya, akan lebih baik jika Pemerintah dan DPR menaikkan level Bapanas menjadi Kementerian Pangan yang menerinya merangkap Kepala BULOG.

SAAT ini, DPR tengah menggodok RUU Pangan. Di dalam draf RUU Pangan tersebut ada usulan agar Bapanas digabung ke Bulog. Apa tanggapan Anda?

Di draf RUU Pangan versi 24 September 2025, Bapanas dan Perum BULOG disatukan menjadi BULOG. Institusi baru ini resmi berdiri pada 1 Januari 2026. Maka, Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan berakhir pada 31 Desember 2025. Jika langkah ini berjalan mulus berarti untuk kesekian kalinya pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo melakukan eksperimen baru.

Jika sebelumnya menambah formasi kementerian dan lembaga di Kabinet Merah Putih dengan memecah beberapa kementerian, kali ini menyatukan dua institusi: Bapanas dan Perum BULOG.

Apa dampaknya jika Bapanas dan Bulog digabung? Tentu ada risiko: untuk penyesuaian. Bisa seretlah tahun, setahun atau lebih. Semakin lama waktu adaptasi akan semakin besar ongkos yang ditanggung.

Lalu, apa pandangan Anda terkait dengan isu tersebut? Hemat saya, akan lebih baik jika Pemerintah dan DPR menaikkan level Bapanas menjadi Kementerian Pangan yang menerinya merangkap Kepala BULOG.

Maksudnya, bagaimana? BULOG menjadi bagian penuh dari Kementerian Pangan. Bukan hanya operator seperti saat ini. Dengan cara ini, Kementerian Pangan

bisa bertindak sebagai regulator dan eksekutor sekaligus.

Jika demikian, apakah nantinya tugas dan fungsinya akan bertabrakan dengan Kementerian Pertanian dan lainnya? Tentu, dengan keberadaan Kementerian Koordinator Pangan di Kabinet Merah Putih saat ini, tugas dan wewenang Kementerian Pangan mesti ditata agar tidak tumpang tindih.

Dengan mandat yang kuat dan jelas, yang terumuskan dalam fungsi, tugas, dan wewenang. Kementerian Pangan dan BULOG berpotensi menjadi pengubah permainan (*game changer*) tata kelola pangan.

Catatan, Kementerian Pangan dan BULOG mesti diperkuat sebagai penyangga pasokan dan stabilitas harga pangan nasional. ■ REN

### FIRMAN SOEBAGYO

Anggota Komisi IV DPR

## Itu Akan Lebih Bagus & Efektif



“Biar Menteri Pangan yang mengurus beras rakyat, Menteri Perdagangan mengatur beras yang untuk konsumsi umum, yang premium

ADA usulan agar Bapanas digabung dengan Bulog. Apakah Anda sepakat dengan usulan tersebut?

Kalau misalnya Bapanas digabung dengan Bulog memang tepat dengan tujuan dari Pak Presiden untuk swasembada pangan. Dan idealnya memang Bapanas itu satu atap di Bulog. Karena berdasarkan Undang-Undang Pangan Nomor 18 tahun 2012, Pasal 26 itu Bapanas dipimpin oleh Bulog karena ingin mengembalikan fungsinya.

Jika Bapanas dan Bulog digabung, apakah tidak bertabrakan dengan kementerian lain, seperti Kemertan?

Menurut pandangan saya, Kementerian Pertanian itu harus konsentrasi dalam produksi. Sedangkan yang terkait dengan masalah pengelolaan hasil produksi pertanian dikelola oleh Bulog.

Saat ini, yang memainkan peran harga, bukan lagi Pemerintah yang mengendalikan. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara yang jumlah penduduk besar, maka harus kembali bahwa sandang, pangan itu menjadi tanggung jawab negara, maka negara punya hak untuk mengatur regulasi dan mengendalikan lagi kewenangan Bulog itu menjadi paper stock dan penyangga harga.

Ada usulan kalau Bapanas dan Bulog digabung, lalu membentuk Kementerian Pangan? Itu akan lebih bagus, lebih efektif. Bahkan kalau bisa Kementerian Pangan dan Kabinulog itu akan mengangkat.

Jadi, Menteri Pangan sebagai regulator, kemudian badan logistiknya atau Bolognya sebagai operatornya. Itu malah akan memudahkan mata rantai pasok, kemudian akan memudahkan

pengendalian terhadap masalah distribusi pangan nasional, sehingga kedepan itu Bapanas dan Bulog diberikan kewenangan untuk mengelola beras rakyat. Yang jumlahnya bisa sampai 67 persen, sehingga yang 20 persen hingga 30 persen beras premium dimainkan oleh para pelaku usaha. Jadi ada pemerataan.

Tapi yang beras rakyat ini menjadi tanggung jawab negara. Oleh karena itu beras yang diatur, yang dikelola Bulog ini ada beras untuk kepentingan rakyat.

Jadi, pada prinsipnya Anda setuju kalau misalnya ada Kementerian Pangan? Setuju. Itu malah bagus. Akan lebih efektif dan efisien dan ekonomis. Itu bisa memotong mata rantai pasok, dan kemudian Menteri Perdagangan tidak perlu ikut campur mengenai beras rakyat ini. ■ REN